

BAHAN AJAR
PERTEMUAN 10

Periode 1950 - Masa Sekarang

1963: Perjanjian Elysée

Perjanjian Persahabatan Jerman- Perancis di-tandatangani oleh Kanselir Federal Konrad Adenauer (kanan) dan Presiden Perancis Charles de Gaulle. →

Catatan dari teks asli:

Élysée-Vertrag



Unterzeichnung des Vertrages im Pariser Élysée-Palast

Der als **Élysée-Vertrag** bezeichnete **deutsch-französische Freundschaftsvertrag** wurde am 22. Januar 1963 von **Bundeskanzler Konrad Adenauer** und vom französischen Staatspräsidenten **Charles de Gaulle** im Pariser **Élysée-Palast** unterzeichnet. Dieses Abkommen über die **deutsch-französische Zusammenarbeit** hat die beiden Nachbarn in Europa nach langer „Erbfeindschaft“ und verlustreichen Kriegen seitdem immer mehr zusammengeführt. Der Vertrag verpflichtet beide Regierungen zu **Konsultationen** in allen wichtigen Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik. Ebenso wurden regelmäßige Treffen auf Regierungsebene beschlossen, die in seither regelmäßigen Abständen durchgeführt wurden. Auf französischer Seite war **François Seydoux de Clausonne** wesentlich am Zustandekommen des Vertrages beteiligt, in Deutschland war es Adenauers außenpolitischer Berater **Horst Osterheld**.

Für zwischenzeitliche Verstimmung sorgte die Präambel, die dem Vertrag von deutscher Seite vor der Ratifizierung hinzugefügt wurde. Darin erklärten die Deutschen ihre enge Bindung an die USA und den Willen zur Aufnahme Großbritanniens in die **EWG**. De Gaulle hingegen verfolgte das Ziel, mit Hilfe der Bundesrepublik Deutschland die Position Europas gegenüber den USA zu stärken und auszubauen, also die Bedeutung der USA zu schwächen.

Der Vertrag trat nach Unterzeichnung am 2. Juli 1963 in Kraft. Ihm folgte am 5. Juli 1963 das Gründungsabkommen für das **Deutsch-Französische Jugendwerk**. In der Folgezeit entstanden zahlreiche Städtepartnerschaften und Partnerschaften zwischen Schulen und Vereinen.

1988 setzten Bundeskanzler **Helmut Kohl** und der französische Staatspräsident **François Mitterrand** in Ergänzung des Vertrages Räte für die Abstimmung von Verteidigungsinteressen (**Deutsch-französischer Verteidigungs- und Sicherheitsrat**) und der Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik ein. Seit 2001 finden darüber hinaus infolge des „Blaesheim-Abkommens“ die Treffen zwischen beiden Regierungschefs auf 6- bis 8-wöchentlicher Basis statt.

Literatur

- Ansbert Baumann: *Begegnung der Völker? Der Elysée-Vertrag und die Bundesrepublik Deutschland. Deutsch-französische Kulturpolitik von 1963 bis 1969*. Frankfurt/M. 2003.
- Ansbert Baumann: *Die organisierte Zusammenarbeit. Die deutsch-französischen Beziehungen am Vorabend des Elysée-Vertrags (1958–1962)*. Ludwigsburg 2002.

- Corine Defrance, [Ulrich Pfeil](#) (Hg.): *Der Élysée-Vertrag und die deutsch-französischen Beziehungen 1945–1963–2003*. München 2005.
- Ulrich Lappenküper: *Deutsch-französische Wechselwirkungen. Entente élémentaire. Die Geschichte des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags vom 22. Januar 1963*. Vortrag anlässlich des 40. Jahrestages der Unterzeichnung des E.V. am 22. Januar 2003. Hrsg. [DVA-Stiftung](#) 2003, 22 S. (nicht im Handel)
- Ulrich Lappenküper: *Die deutsch-französischen Beziehungen 1949–1963. Von der Erbfeindschaft zur Entente élémentaire*. 2 Bände, München 2001.
- [Ulrich Pfeil](#): *Die DDR und der Elysée-Vertrag vom 22. Januar 1963*, in: Heiner Timmermann (Hg.), *Die DDR in Deutschland. Ein Rückblick auf 50 Jahre*, Berlin, Duncker & Humblot, 2001, S. 91–106.
- [Ulrich Pfeil](#): *Die „anderen“ deutsch-französischen Beziehungen. Die DDR und Frankreich 1949–1990* (Zeithistorische Studien des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam, Bd. 26), Köln, Böhlau, 2004.
- Gilbert Zieburg: *Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945. Mythen und Realitäten*. Stuttgart 1997.

1970: Berlutut di Warsawa

Isyarat Kanselir Federal Willy Brandt (SPD) pada monumen untuk para korban pemberontakan di kampung Yahudi di Warsawa menjadi simbol permintaan Jerman akan rekonsiliasi. →

Perbatasan Oder-Neisse

Perbatasan Oder-Neisse ([Jerman](#): *Oder-Neiße-Grenze*; [bahasa Polandia](#): *Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej*) adalah batas di antara [Jerman](#) dan [Polandia](#). Garis perbatasan ini kebanyakan menurut aliran [sungai Oder](#)/Odra dan [Neisse](#)/Nysa Łużycka, tetapi menyimpang di sebelah utara untuk memasukkan kota Szczecin/Stettin, di Tepi Barat Oder/Odra di Polandia.

Sejarah perbatasan



Perbatasan Oder-Neisse

Sebelum [Perang Dunia II](#), batas Barat Polandia dengan Jerman sudah diperbaiki di bawah syarat-syarat [Perjanjian Versailles 1919](#) dan secara umum menyusuri batas provinsi [Polandia Besar](#), tetapi dengan penyesuaian tertentu yang dimaksudkan untuk memantulkan susunan etnik yang lebih sesuai.

Tetapi [Pomerania](#), [Silesia](#) dan [Masuria](#) dibagi, membiarkan wilayah besar di daerah pedesaan yang dihuni penduduk-penduduk Slavia berada di wilayah Jerman sementara beberapa pusat perkotaan yang sebagian besar dihuni etnik Jerman berada di pihak Polandia. Selain itu, batas adalah salah satu kemungkinan perbatasan yang paling panjang dan meninggalkan dua eksklave di utara Polandia ([Kota Bebas Danzig](#) dan [Prusia Timur](#)).

Pada [1945](#), di bawah ganti teritorial diminta oleh Uni Soviet, batas dipindahkan ke barat ke dalam Jerman sebelum perang, ke garis Oder-Neisse, melingkungi sebagian besar Silesia dan

Pomerania, termasuk [Stettin](#), di sebelah barat Oder, tambah wilayah timur [Brandenburg](#) dalam Polandia.

Di wilayah timur perbatasan Polandia-Jerman, kota [Danzig](#) dan bagian selatan [Prusia Timur](#), [Masuria](#) dan [Warmia](#) diberikan kepada Polandia.

Ganti ini diikuti oleh serah-terima penduduk umum di antara Polandia dan Jerman, termasuk orang Jerman yang tinggal di wilayah Polandia dan orang tergusur Polandia di zona pekerjaan Jerman. Selain itu penduduk Polandia dari setengah Timur Polandia, yang sekarang dicaplok oleh Uni Soviet dideportasi dan dipindahkan ke wilayah Polandia Barat yang baru.

Alasan perubahan batas Jerman-Polandia, adalah pencaplokkan Jerman pada 1939 yang melebihi batas Jerman tahun 1914 dan keputusan Uni Soviet untuk mencaplok belahan timur Polandia, yang sudah disetujui oleh Sekutu Barat.

Karena peristiwa baru pendudukan Polandia oleh Jerman, termasuk deportasi brutal sebanyak 800.000 jiwa yang masih tersisa hidup di antara puing Warsawa setelah [Pemberontakan Warsawa](#), tidak banyak orang yang menentang perubahan perbatasan Polandia-Jerman ini.

Sekutu menentukan perbatasan Polandia

Keputusan tak bisa diganggu-gugat untuk memindahkan batas Barat Polandia ke barat dibuat oleh AS, Britania dan Soviet pada [Konferensi Yalta](#), tetapi tanpa keterlibatan atau izin pihak Polandia, sesaat sebelum akhir Perang Dunia II. Lokasi persis perbatasan dibiarkan terbuka; Sekutu Barat juga menyetujui prinsip umum garis Oder-Neisse sebagai perbatasan barat Polandia di masa depan dan deportasi atau peralihan penduduk sebagai cara untuk mencegah perselisihan perbatasan di masa depan.

Pertanyaan yang masih terbuka ialah apakah sebaiknya sungai Neisse timur (*Glatzer Neiße*) atau barat (*Lausitzer Neiße*) yang dijadikan perbatasan dan apakah kota [Stettin](#) diberikan kepada Polandia atau tidak.

Semestinya Jerman tetap memegang Stettin dan orang Polandia seharusnya mendapatkan [Prusia Timur](#) termasuk [Königsberg dan sekitarnya](#), namun Stalin menentukan bahwa dia memerlukan Königsberg sebagai pelabuhan air hangat yang sepanjang tahun bisa dipakai. Lalu orang Polandia Stettin yang lalu disebut Szczecin sebagai kompensasi.

Orang Polandia juga bersikeras untuk tetap menguasai [Lwów](#) di [Galicia](#), tetapi Stalin menolak dan menawarkan [Silesia](#) dengan [Breslau](#) sebagai gantinya (sebagai catatan menarik untuk dikemukakan bahwa banyak mantan warga Lwów dipindahkan ke Wrocław, selain ke [Gdańsk](#)).



Perbatasan lama dan baru Polandia, 1945

Di **Konferensi Potsdam** Amerika Serikat, Britania Raya, dan Uni Soviet memutuskan untuk menyita wilayah Jerman di sebelah timur garis Oder-Neisse dan membaginya kepada Polandia dan Uni Soviet (propaganda **Partai Komunis Uni Soviet** di Polandia merujuknya sebagai "Wilayah Barat" atau "**Wilayah Yang Dimenangkan Kembali**").

Kemudian diharapkan kedatangan bahwa perjanjian perdamaian terakhir akan menyusul dengan cepat dan baik akan menegaskan batas atau menentukan batas persis. Lalu juga diputuskan bahwa orang Jerman yang tinggal di Polandia sebaiknya dipindahkan ke Jerman (**pengusiran Jerman**).

Persetujuan terakhir memberikan ganti rugi kepada Polandia untuk 187.000 km² yang berada sebelah timur **garis Curzon** dengan 112.000 km² mantan wilayah Jerman.

Bagian utara Prusia Timur secara langsung dicaplok oleh **Uni Soviet**. Salah satu sebab untuk versi terakhir garis batas adalah fakta bahwa perbatasan ini mungkin yang paling pendek di antara Polandia dan Jerman. Panjangnya hanya 472 km, karena meregang dari titik paling utara **Ceko** ke salah satu ujung paling selatan **Laut Baltik** di muara **sungai Oder**. Batas sebelumnya sudah adalah salah satu batas yang paling panjang di Eropa, terdiri dari lebih dari 1400 km.

Pengakuan perbatasan Oder-Neisse oleh pemerintah Jerman



Perbatasan Oder-Neisse di tepi barat **sungai Neisse** dekat Bahren.

Pemerintah **Jerman Timur** menandatangani perjanjian dengan Polandia pada tahun 1950 dan mengakui garis Oder-Neisse, dan secara resmi menyebutnya "Perbatasan Damai dan Persahabatan." "Pada sebuah perjanjian baru yang ditanda-tangani pada 1989 oleh Polandia dan Jerman Timur, batas laut ditentukan."

Di 1952, pengakuan garis Oder-Neisse sebagai batas permanen adalah salah satu kondisi bagi Uni Soviet untuk menyetujui Jerman yang dipersatukan kembali. Penyatuan kembali ditolak oleh Kanselir Jerman Barat **Konrad Adenauer** untuk beberapa sebab.

Di **Jerman Barat**, pengakuan garis permanen awalnya dianggap tak dapat diterima.

Sebenarnya, Jerman Barat sebagai bagian **Doktrin Hallstein** tidak mengakui baik Polandia ataupun Jerman Timur. Sikap Jerman Barat berganti dengan kebijakan **Ostpolitik** yang diprakarsai oleh **Willy Brandt**; di 1970 Jerman Barat menandatangani perjanjian dengan Polandia dan Uni Soviet yang mengenali garis Oder-Neisse sebagai batas faktual Polandia, dengan begitu membuat kunjungan keluarga oleh orang Jerman tergusur ke daerah tanah air mereka yang dahulu menjadi mungkin.

Pada tanggal 14 November 1990 sebagai pelaksanaan persyaratan persatuan dengan **Jerman Timur**, Republik Federal Jerman memperbaiki undang-undang dasarnya, **Konstitusi Jerman**, untuk menyingkirkan artikel mengenai wilayah Jerman sebelum Perang Dunia II, seperti diminta oleh Polandia dan mantan negara-negara yang menduduki Jerman atau pemenang Perang Dunia II.

Persetujuan perbatasan Jerman-Polandia 1991 mengakui garis Oder-Neisse sebagai perbatasan Jerman-Polandia. Sebagai bagian dari persetujuan, kedua negara mengakui hak-hak politik dan

kebudayaan dasar baik untuk minoritas-minoritas Jerman maupun Polandia yang tinggal di salah satu dari kedua sisi perbatasan.

Kota-kota yang terbagi



Kota lama Görlitz dilihat dari sisi Polandia.

Setelah Perbatasan Oder-Neisse ini ditetapkan, beberapa **kota terbagi** menjadi dua. Bagian barat berada di **Jerman** dan bagian timur menjadi terletak di **Polandia**. Kota-kota ini adalah:

Frankfurt an der Oder - **Slubice**

Guben - **Gubin**

Görlitz - **Zgorzelec**

Catatan dari teks asli:

Oder-Neiße-Grenze



Grenzverlauf zwischen Deutschland und Polen



Deutsches Neiße-Ufer bei Bahren



Blick über die Neiße von Zgorzelec auf die deutsche Altstadt in Görlitz

Die **Oder-Neiße-Grenze** ist die überwiegend entlang der Flüsse **Oder** und **Lausitzer Neiße** verlaufende Grenze zwischen **Deutschland** und **Polen**.

Der Grenzverlauf zwischen dem besiegten **Deutschland** und der 1944 ausgerufenen **Volksrepublik Polen** wurde durch die **Oder-Neiße-Linie** im Rahmen des **Potsdamer Abkommens** am 2. August 1945 von den **Alliierten** vorbehaltlich des Abschlusses einer endgültigen Friedensregelung festgelegt. Hierdurch wurde etwa ein Viertel des **deutschen Staatsgebietes in den Grenzen von 1937** de facto abgetrennt und unter vorläufige polnische beziehungsweise sowjetische **Verwaltung** gestellt.

Bereits kurze Zeit nach ihrer Gründung am 7. Oktober 1949 erkannte die **DDR** im **Görlitzer Abkommen** vom 6. Juli 1950 die Oder-Neiße-Grenze an, ohne jedoch **Stettin** und **Swinemünde**, die westlich der Oder liegen, zu erwähnen. Im offiziellen Sprachgebrauch der DDR wurde die Grenze als „Oder-Neiße-Friedensgrenze“ bezeichnet. Die ebenfalls 1949 gegründete **Bundesrepublik Deutschland** erkannte erst am 7. Dezember 1970 im **Warschauer Vertrag** die Oder-Neiße-Linie unter dem Vorbehalt einer Änderung im Rahmen einer Friedensregelung als faktische *unverletzliche* Westgrenze der damaligen Volksrepublik Polen an.

Als im Zuge der sich anbahnenden **deutschen Wiedervereinigung** 1990 insbesondere in der Republik Polen die Sorge wuchs, das **vereinigte Deutschland** könne eine **Revision** der deutschen Ostgrenzen fordern, verlangten die vier **Siegermächte** als Voraussetzung für ihre Zustimmung zur Deutschen Einheit die endgültige Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze als rechtmäßige Staatsgrenze zwischen Deutschland und Polen. Diese Anerkennung wurde im **Zwei-plus-Vier-Vertrag** verankert und im **deutsch-polnischen Grenzvertrag** vom 14. November 1990 in einem **völkerrechtlichen Vertrag** bekräftigt. Durch diesen am 16. Januar 1992 in Kraft getretenen Vertrag gab die Bundesrepublik Deutschland alle Ansprüche auf die **Ostgebiete des Deutschen Reiches** auf, die östlich dieser Linie lagen und seitdem auch **völkerrechtlich** zu Polen gehören.^{[1][2][3]}

Geschichte

Vorgeschichte

Die nach dem **Zweiten Weltkrieg** durch die **Potsdamer Beschlüsse** unter polnische Verwaltung gestellten **Gebiete des Deutschen Reichs in den Grenzen von 1937** umfassten die preußischen Provinzen **Pommern**, **Schlesien**, **Ostpreußen** sowie die östlich der Oder gelegenen Gebiete Brandenburgs (**Neumark**). In diesem Gebiet und im Territorium der seit dem **Versailler Vertrag** selbständigen **Freien Stadt Danzig** stellte die deutschsprachige Bevölkerung insgesamt die Mehrheit, auch wenn es in bestimmten Gebieten starke polnischsprachige Bevölkerungsanteile gab (**Oberschlesien**, **Masuren**). Nach dem Ende des **Ersten Weltkrieges** 1918 waren Grenzgebiete zwischen dem **Deutschen Reich** und dem 1916 neu entstandenen polnischen Staat umstritten. **Polen** erhob Anspruch auf Teile dieser Gebiete und begründete dies zum einen mit polnischen Bevölkerungsminderheiten, zum anderen damit, dass diese Gebiete in früheren Jahrhunderten zum Teil unter polnischer Herrschaft gestanden hatten. Dies betraf in erster Linie Teile Oberschlesiens und Masurens, in denen Volksabstimmungen durchgeführt wurden, welche jedoch eine mehrheitliche Orientierung zu **Deutschland** ergaben. Der endgültige Grenzverlauf in **Ostoberschlesien** wurde erst 1922 festgelegt.^[4]



Grenzverläufe Polens zwischen den beiden Weltkriegen und danach. *Grüne Linie*: von den [Westalliierten](#) am 8. Dezember 1919 als Demarkationslinie zwischen [Sowjetrussland](#) und [Polen](#) verkündete, auf dem [ethnographischen Prinzip](#) basierende *Curzon-Linie*. *Blaue Linie*: die nach Ende des Ersten Weltkriegs bis 1923 durch Gebietserwerbungen General [Józef Piłsudskis](#) (Ostgalizien 1919, [Wolynien](#) 1921 und Wilna-Gebiet 1920/1922) unter Missachtung der Curzon-Linie zustandegekommene Grenze, die bis zum 1. September 1936 gegolten hatte. *Braune Linie*: deutsch-sowjetische Demarkationslinie vom 28. September 1939. *Rote Linie*: die heutige Staatsgrenze Polens; links die Oder-Neiße-Linie. *Türkisfarbene Fläche*: von Polen nach Ende des Ersten Weltkriegs bis 1923 vorgenommene Gebietserweiterung. *Gelbe Fläche*: von Polen als Kompensation für den Verlust der Gebiete östlich der Curzon-Linie geltend gemachte [Ostgebiete des Deutschen Reiches](#) in den Grenzen von 1937 (,Westverschiebung‘).

Seit dem Aufkommen des [Nationalismus](#) im 19. Jahrhundert wurde östlich der Oder-Neiße-Linie die jeweils nicht das [Staatsvolk](#) bildende Bevölkerung [diskriminiert](#). Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges traf dies die polnischsprachigen Bewohner unter deutscher, ab 1919 die unter polnische Herrschaft geratenen deutschsprachigen im neu gebildeten polnischen Staat. Viele sahen sich gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, und siedelten ins Deutsche Reich um.

Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges [definierten](#) die beiden Diktatoren [Adolf Hitler](#) und [Josef Stalin](#) in einem [geheimen Zusatzprotokoll](#) die politisch-territorialen [Interessensphären](#) des Deutschen Reichs und der [Sowjetunion](#) durch Vereinbarung einer deutsch-sowjetischen Demarkationslinie. Diese [Demarkationslinie](#) orientierte sich weitgehend an der 1919 von den [Westalliierten](#) verkündeten, auf dem [ethnographischen Prinzip](#) beruhenden *Curzon-Linie* (vgl. *die nebenstehende Graphik*). Auf das Verfahren, bei der Festlegung der Ostgrenze Polens das ethnographische Prinzip walten zu lassen, hatte sich Russland bereits 1915 unter seinem Ministerpräsidenten Ivan Longinovich Gomerykin (* 1839; † 1917) mit [Roman Dmowski](#) geeinigt.^[5] Die deutsch-sowjetische Vereinbarung wies die nach dem Ersten Weltkrieg bis 1923 von Polen eroberten Gebiete östlich der Curzon-Linie ([Ostgalizien](#) 1919, [Wolynien](#) 1921, ehemals russisch-litauisches *Gouvernement Wilna* 1920/1922) wieder der sowjetischen territorialen Interessensphäre zu.

In den von [Deutschland](#) annektierten Gebieten Polens sowie in Teilen des [Generalgouvernements](#) verfolgten die [Nationalsozialisten](#) das Ziel einer vollständigen [Germanisierung](#). Große Teile der polnischen Bevölkerung wurden aus diesen Gebieten vertrieben. Die polnische Elite wurde weitgehend ermordet und weite Teile der polnischen Bevölkerung wurden zur [Zwangsarbeit in das Deutsche Reich](#) verschleppt.

Auf der [Jalta-Konferenz](#) im Februar 1945 fassten [Winston Churchill](#), [Franklin D. Roosevelt](#) und Josef Stalin den Plan einer [Westverschiebung Polens](#). Churchill und Roosevelt sprachen in Jalta von der „Oder-Grenze“, Stalin von „Oder und Neiße“. Scheinbar war die Grenzfrage noch offen. Stalin wollte jedoch die Teile östlich der *Curzon-Linie* (Westteil [Weißrusslands](#) und der [Ukraine](#))

für die [Russische Sowjetrepublik](#) zurückgewinnen, die nach dem Ersten Weltkrieg von Polen erobert worden waren. Dies stieß bei der polnischen Exilregierung in London auf Widerspruch, Stalin hatte sich aber bereits im Juli 1944 in einem geheimen Vertrag mit dem [Lubliner Komitee](#) auf die Oder-Neiße-Grenze festgelegt.^[6] Der von Stalin angestrebte Grenzverlauf im Osten – zwischen der [Sowjetunion](#) und Polen – entsprach dabei ziemlich genau dem, was er bereits zuvor im Pakt mit Hitler vereinbart hatte.

Siehe hierzu auch: [Polnische Westforschung](#)
Potsdamer Konferenz und Nachkriegszeit



Polnische Soldaten setzen Grenzpfosten am Oderufer

Bereits im Frühjahr und Frühsommer 1945 übertrug die Sowjetunion die [Verwaltungshoheit](#) der Gebiete, die Polen zugesichert waren, der provisorischen polnischen Regierung, obwohl in Jalta keine Vereinbarung über die polnische Westgrenze zustande gekommen war. Die deutsche Bevölkerung wurde zunächst unkontrolliert, später planmäßig vertrieben oder zur [Zwangsarbeit](#) nach [Sibirien](#) verschleppt, während eigene Landsleute auch auf bisher deutschem Staatsgebiet angesiedelt wurden, die zum Teil aus den von der Sowjetunion annektierten Ostgebieten Polens stammten. Im Juli 1945 wurde das westlich der Oder gelegene [Stettin](#) mit Umland, welches bis dahin noch unter deutscher Verwaltung stand, mit Einverständnis der Alliierten von der [Roten Armee](#) unter polnische Verwaltung gestellt. Mit der Aussiedlung beziehungsweise [Vertreibung](#) der deutschen Bevölkerung, der Ansiedlung polnischer Einwohner sowie der [Polonisierung](#) deutscher Siedlungsgebiete östlich der Oder-Neiße-Linie durch administrative Eingliederung in den polnischen Staatsverband und Umbenennung fast sämtlicher Ortschaften wurden ab Sommer 1945 von der polnischen Regierung vollendete Tatsachen geschaffen.

Konfrontiert mit vollendeten Tatsachen, akzeptierten auch die beiden Westalliierten im August auf der [Potsdamer Konferenz](#) die sowjetische und polnische Verwaltung dieser Gebiete für die Zeit bis zu einer friedensvertraglichen Regelung. Für das nördliche [Ostpreußen](#) mit [Königsberg](#) sagten die Westalliierten in Potsdam der Sowjetunion die Unterstützung ihres [Annexionswunsches](#) zu. Für Polen fehlt eine solche Zusage hinsichtlich der übrigen Oder-Neiße-Gebiete.

Strittig war zunächst auch, ob die Grenzziehung entlang der [Lausitzer](#) oder der [Glatzer Neiße](#) erfolgen sollte. Es wird kolportiert, dass den amerikanischen und englischen Verhandlungsdelegationen die Existenz der Lausitzer Neiße anfangs nicht bewusst gewesen sei. Von diesen wurde kurzzeitig statt der Oder-Neiße-Linie noch die 50 Kilometer weiter östliche Oder-[Bober](#)-Linie (besser: Oder-Bober-[Queis](#)-Linie) als deutsche Ostgrenze ins Spiel gebracht, die Sowjetunion verweigerte aber die Zustimmung dazu. Eine solche Regelung hätte immerhin die östliche [Lausitz](#) komplett bei Deutschland belassen und die Teilung von Städten wie [Görlitz](#) und [Guben](#) vermieden. Letztlich einigte man sich auf die Lausitzer Neiße.

Es wurde auch beschlossen, den „Transfer“ der in der [Tschechoslowakei](#) und Polen lebenden Deutschen „in geordneter und humaner Weise“ durchzuführen. Die Potsdamer Konferenz mahnte, die sogenannten „wilden“ Vertreibungen der Deutschen einzustellen. Dennoch erfolgten

in den folgenden Jahren weitere Vertreibungsaktionen durch kommunistische und nationalistische Gruppen, Militär und **paramilitärische Verbände** aus den übrigen Teilen des Deutschen Reiches östlich der Oder-Neiße-Linie und aus dem **Sudetenland**.

Die Grenzlinie wurde zunächst von der 1946 gegründeten **SED** abgelehnt, die ihre Haltung später aber unter sowjetischem Druck revidierte. Im März/April 1947 erfolgte die offizielle Bezeichnung der Oder-Neiße-Grenze als „Friedensgrenze“ durch die Moskauer Außenministerkonferenz. Am 11. Januar 1949 wurden die neuen Gebiete formal in die polnische Staatsverwaltung eingegliedert. Im offiziellen polnischen Sprachgebrauch heißen sie *wiedergewonnene West- und Nordgebiete* oder auch kurz *neue Westgebiete* zur Unterscheidung von den bereits 1919 erhaltenen *alten Westgebieten*.



Görlitzer Abkommen (DDR-Briefmarke 1951)



Veranstaltung zum Görlitzer Abkommen im Januar 1951

1949 nahmen Polen und die DDR diplomatische Beziehungen auf und unterzeichneten am 6. Juli 1950 in Warschau das **Görlitzer Abkommen** durch DDR-Ministerpräsident **Otto Grotewohl** und Polens Ministerpräsident **Józef Cyrankiewicz** zur Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Sie sei „*unantastbare Friedens- und Freundschaftsgrenze, die die beiden Völker nicht trennt, sondern einigt*“. Sie verläuft „*von der Ostsee entlang der Linie [...] Świnoujście (Swinemünde), [...] Oder bis zur [...] Lausitzer Neiße [...] entlang bis zur tschechoslowakischen Grenze*“, womit sie „*die Staatsgrenze zwischen Deutschland und Polen bildet*.“ Das Stettiner Gebiet wurde nicht erwähnt, ebenso wenig die in **Potsdam** getroffene Feststellung, die Grenzbeschreibung gelte nur bis zur „*endgültigen Festlegung der Westgrenze Polens*“ in einer kommenden Friedensregelung. Dieser Vertrag wurde von den **USA** und **Großbritannien** abgelehnt, die **Bundesregierung** erklärte ihn für „*null und nichtig*“. Sie berief sich auf die im Görlitzer Vertrag fehlende Bedingung, dass die Entscheidung über die gegenwärtig polnisch und sowjetisch verwalteten deutschen Ostgebiete erst in einem späteren **Friedensvertrag** gefällt werde.

Annäherung unter Willy Brandt und Warschauer Vertrag

1965 wurde in einer Ostdenkschrift der **Evangelischen Kirchen in Deutschland** (EKD) erstmals von einer bedeutenden Organisation vorsichtig die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie befürwortet. Diese – innerkirchlich höchst umstrittene – Stellungnahme hatte erhebliches Gewicht, weil fast 90 Prozent der aus den Oder-Neiße-Gebieten vertriebenen Deutschen evangelisch waren.

1968 votierte **Willy Brandt**, Außenminister in der **Großen Koalition**, für eine „*Anerkennung beziehungsweise Respektierung der Oder-Neiße-Grenze bis zur friedensvertraglichen*

Regelung“. Im Jahr darauf erklärte er in seiner Regierungserklärung als **Bundeskanzler** der **ersten sozialliberalen Koalition** ziemlich eindeutig, dass er die Oder-Neiße-Linie als Grenze anzuerkennen beabsichtige. Die Absicht Brandts löste im **Deutschen Bundestag** und bei Vertretern der **Landsmannschaften** heftige Reaktionen aus.^[7]

Am 7. Dezember 1970 schlossen Polen und die Bundesrepublik Deutschland den **Warschauer Vertrag**. Beide Seiten bekundeten, dass die aus den Potsdamer Beschlüssen herrührende bestehende Grenzlinie die „*westliche Staatsgrenze der Volksrepublik Polen bildet*“. Man habe „*gegeneinander keine Gebietsansprüche*“ und werde solche „*auch in Zukunft nicht erheben*“. Ein Rückkehrrecht für die Vertriebenen oder Minderheitenrechte für die in der Heimat verbliebenen Deutschen wurden nicht vereinbart und von deutscher Seite auch nicht gefordert. Die **Ostverträge** wurden Ende 1971 unter Enthaltung der Union durch den Bundestag angenommen. In einer Entschließung vom 17. Mai 1972 erklärte der Bundestag einstimmig bei fünf Enthaltungen, die Bundesrepublik habe die Verpflichtungen im **Moskauer Vertrag** und im Warschauer Vertrag „*im eigenen Namen auf sich genommen*“. Die Verträge gingen „*von den heute tatsächlich bestehenden Grenzen aus, deren einseitige Änderung sie ausschließen*“. Sie nähmen eine „*friedensvertragliche Regelung nicht vorweg*“ und schafften „*keine Rechtsgrundlage für die heute bestehenden Grenzen*“. Hintergrund war der **Vorbehalt der Vier Mächte für Deutschland als Ganzes**. Demzufolge war die nicht voll souveräne Bundesrepublik nicht berechtigt, völkerrechtswirksame Änderungen der Grenzen von 1937 vorzunehmen.^[8]

Diplomatische Beziehungen zwischen Bonn und Warschau wurden im September 1972 aufgenommen. Das **Bundesverfassungsgericht** stellte im Juli 1975 dann auch fest, dass die Bundesrepublik nicht auf die Gebiete östlich von Oder und Neiße verzichten konnte und wollte.^[9] „*Mit Rücksicht auf die Gesamtverantwortung der Vier Mächte für Deutschland als Ganzes konnten nach der Rechtsauffassung der Bundesregierung Verfügungen über den territorialen Status Deutschlands, die eine friedensvertragliche Regelung vorweggenommen hätten, ohne die Zustimmung der Vier Mächte nicht getroffen werden. [...] Der Wille der Bundesrepublik, bei den Grenzregelungen der Verträge von Moskau und Warschau nicht über den territorialen Status Deutschlands zu verfügen, war auch für die Vertragspartner erkennbar und hat sogar seinen Niederschlag in den Verträgen selbst gefunden. Nach Art. 4 des Moskauer Vertrages bleiben die von den Vertragspartnern früher abgeschlossenen zweiseitigen und mehrseitigen Verträge und Vereinbarungen unberührt. Hierzu gehören auch die Abkommen, aus denen sich die Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf Deutschland als Ganzes ergeben.*“

1985 führte die Ausdehnung der DDR-**Hoheitsgewässer** in der **Stettiner Bucht** zu Zwistigkeiten mit Polen. Daraufhin wurde am 22. Mai 1989 ein Vertrag zwischen der DDR und der **Volksrepublik Polen** über die Abgrenzung der Seegebiete in der Stettiner Bucht abgeschlossen.

Deutsche Wiedervereinigung

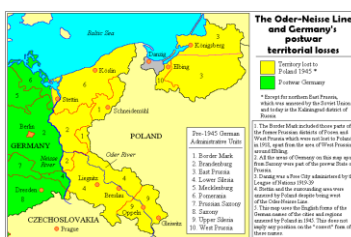
1990 wird im **Zwei-plus-Vier-Vertrag** die bestehende Grenze zwischen dem vereinten Deutschland und Polen bestätigt. Mit Inkrafttreten des **Einigungsvertrages** zwischen der DDR und der „alten“ Bundesrepublik traten auch die darin vereinbarten Änderungen des **Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland**, neben anderem die Aufhebung des bisherigen **Artikels 23**, in Kraft. In Warschau unterzeichneten die beiden Außenminister, **Krzysztof Skubiszewski** für die **Republik Polen** und **Hans-Dietrich Genscher** für die **Bundesrepublik Deutschland**, den **deutsch-polnischen Grenzvertrag** zur Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden Grenze: „*Der Verlauf der Grenze bestimmt sich nach dem Görlitzer Abkommen (...) sowie dem Warschauer Vertrag*“.

Am 21. Juni 1990 hatten der Deutsche Bundestag und die **Volkskammer** der DDR eine gleichlautende Erklärung zur Westgrenze Polens verabschiedet. Sie enthielt die unmissverständliche Botschaft an Polen.^[10]

„Die Grenze Polens zu Deutschland, so wie sie heute verläuft, ist endgültig. Sie wird durch Gebietsansprüche von uns Deutschen weder heute noch in Zukunft in Frage gestellt. Dies wird nach der Vereinigung Deutschlands in einem Vertrag mit der Republik Polen völkerrechtlich verbindlich bekräftigt werden [...].“

1991 unterzeichneten Bundeskanzler **Kohl**, Außenminister Genscher, Ministerpräsident **Bielecki** und Außenminister Skubiszewski in Bonn den **deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag**, mit dem auch vertraglich vereinbart wird, dass die jeweiligen Minderheiten das Recht haben „ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität, frei zum Ausdruck zu bringen“ – was die staatliche Anerkennung der **Deutschen Minderheit in Polen** bedeutet. Des Weiteren wurde die Einrichtung eines **Deutsch-Polnischen Jugendwerks** vereinbart. Beide Verträge werden am 16. Dezember 1991 durch den Deutschen Bundestag ratifiziert und traten am 16. Januar 1992 in Kraft.

Vertriebenenproblematik



Die ehemaligen deutschen Ostgebiete

Haltung der Westmächte

Die Vertreter der Westmächte, die **Hohen Kommissare**, umgingen trotz Bemühungen des deutschen Kanzlers **Konrad Adenauer** die Frage, was unter einem **vereinten Deutschland** zu verstehen sei.^{[11][12]} Die USA hoben hervor, dass die Frage der deutschen Ostgebiete bis zu einer friedensvertraglichen Regelung aufgrund der vorbehaltlichen Grenzziehung offen war,^[13] US-Hochkommissar **John J. McCloy** blieb im November 1951 bei seiner Auffassung, die Wiedervereinigung beschränke sich auf die vier **Besatzungszonen**.^[14] Gleichwohl hatten die Westmächte in ihrer ersten gemeinsamen „Antwortnote an die Sowjetunion“ vom 25. März 1952 bezüglich der Oder-Neiße-Linie festgestellt, dass „keine endgültigen Grenzen in den Potsdamer Entscheidungen festgelegt wurden, die eindeutig vorsehen, dass die endgültige Entscheidung territorialer Fragen einer Friedensregelung vorbehalten bleiben muss“.^[15]

Im **Deutschlandvertrag** erkannten die Westmächte die Forderung nach Wiedervereinigung Deutschlands zwar an, unterstützten aber den westdeutschen Vorbehalt gegen die Oder-Neiße-Grenze nicht. Sie wollten sich nicht auf eine Wiederherstellung **Deutschlands in den Grenzen von 1937** festlegen.

Integration der Vertriebenen und ihre Verbände

Dass die **Bundesrepublik** die Oder-Neiße-Grenze ablehnte, hatte seinen Ursprung in der Überzeugung, dass weder die Vorgeschichte der östlich davon gelegenen deutschen Gebiete noch die nationalsozialistischen Verbrechen das Unrecht der Vertreibung rechtfertigen würden. Gewählte Vertreter der **Vertriebenen** proklamierten am 5. August 1950 in Stuttgart eine **Charta der deutschen Heimatvertriebenen**. Sie versicherten zwar darin, auf Rache und Vergeltung zu verzichten, postulierten jedoch ein „Recht auf **Heimat**“ für sich. Darunter war die Ablehnung der Oder-Neiße-Grenze zu verstehen sowie der Anspruch auch auf die Gebiete östlich dieser Linie.

Die Verträge von 1970 und 1990/91 betreffen nur die Grenzziehung, beziehen sich aber nicht auf **Vertreibung** und Enteignung. Der ambivalenten Politik der beiden **Unionsparteien**, einerseits verbal auf der Forderung nach Revision der Oder-Neiße-Grenze zu beharren, aber in der praktischen Politik diese als Faktum anzuerkennen, wurde vorgeworfen, **revisionistische** Hoffnungen auf Restitution in den Grenzverlauf von 1937, das heißt in die Staatsgrenzen, die vor dem Zeitpunkt des **Münchener Abkommens** sowie vor dem späteren „Anschluss“ **Österreichs** bestanden hatten, zu fördern.^{[16][17]}